

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peristiwa banjir hampir setiap tahun berulang, namun permasalahan sampai saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung makin meningkat baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem drainase cenderung menganut pada paradigma lama, yakni suatu model yang didesain agar aliran runoff secepat mungkin dibuang ke badan air penerima. Prinsip tersebut juga tidak didukung oleh dimensi bangunan yang cukup. Banyak sistem drainase yang dibangun terlalu kecil untuk debit runoff yang terus meningkat sehingga timbul permasalahan.

Akar permasalahan banjir berawal dari peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan. Peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan yang tidak tertib, itu yang menyebabkan permasalahan drainase menjadi sangat kompleks. Tata guna lahan yang tidak memperhatikan kegunaan wilayah bisa mengakibatkan permasalahan banjir. Dalam mengatasi permasalahan ini perlu sistem drainase yang baik, dengan didukung berbagai aspek yang terkait didalamnya. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap penting dan perlunya pemecahan permasalahan banjir yang dihadapi kota, masih belum mengakar kesadaran terhadap hukum;

perundangan serta kaidah-kaidah yang berlaku menambah kompleks masalah banjir yang dihadapi kota-kota di Indonesia.

Paradigma Pemerintahan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang No. 9 tahun 2015, tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Hal ini akan membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kecamatan sebagai penerima sebagian kewenangan dari Pemerintah Kota. Oleh karena itu, kelurahan yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, harus meningkatkan kinerja aparatur menjadi lebih professional, karena perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan lebih mudah mengakses informasi. Sehingga, menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah kelurahan. Pelayanan yang kurang memuaskan kepada masyarakat, sering menimbulkan kekecewaan, yang akan mengakibatkan menurunnya citra organisasi pemerintah yang bersangkutan. Semua tantangan tersebut menimbulkan tuntutan untuk memperbaiki kualitas kinerja Aparatur Pemerintah.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Lurah melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu sekaligus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Kedudukan Kelurahan dalam system pemerintahan RI adalah sebagai

Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan, sebagaimana tersirat dalam pasal 66 ayat 1 Undang undang No 23 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perda No 14 Tahun 2007, Keputusan Wali Kota No 250 Tahun 2008 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Lurah sebagai pemimpin formal yang ada di Kelurahan, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan demikian Lurah harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Tjokroamidjojo (1995, hal. 225) dijelaskan bahwa, "Di satu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi". Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut sertaan masyarakat baik secara

mental atau moral dengan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Keterlibatan masyarakat ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain. Penguatan peran masyarakat, bukanlah sekedar memberikan kesempatan bagi peran serta masyarakat, akan tetapi adalah bagaimana menempatkan masyarakat secara bertahap terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Kelurahan Sekeloa merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Coblong Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perda No 14 Tahun 2007, Keputusan Wali Kota No 250 Tahun 2008 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi kelurahan.

Visi dari Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung adalah “Menjadi Kelurahan Termaju di Kota Bandung”. Definisi dari visi tersebut Kelurahan Sekeloa harus melaksanakan upaya-upaya untuk selalu meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberdayakan lembaga serta seluruh komponen masyarakat guna membangun Kelurahan Sekeloa sebagai Kelurahan Termaju untuk menunjang Kota Bandung yang bermartabat dalam rangka mendorong semakin mantapnya penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Bandung.

Tujuan dari Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan umum dan publik guna mendorong optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan pembangunan kesehatan.

Sasaran :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan/penataan lingkungan fisik dan derajat kesehatan masyarakat.

Program Kerja Kelurahan pada Tahun 2015 antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan baik pembangunan fisik dan non fisik;
2. Rehabilitasi drainase dan penataan trotoar
3. Sosialisasi penanggulangan sampah dan budaya pemilahan sampah skala rumah tangga

Penduduk 25.330 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen baik dari segi adat istiadat, pendidikan dan taraf hidup, status sosial menyebabkan sebagian masyarakat cenderung individual. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan padatnya penduduk, dari segi SDM sangat menguntungkan bagi pemerintahan Kelurahan melaksanakan program pemerintah, namun untuk kegiatan penghijauan, resapan air dan rehabilitasi drainase. Lurah Sekeloa harus bisa melihat pada permasalahan yang timbul dan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat.

Permasalah drainase merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Kelurahan Sekeloa dimana kondisi drainase di kelurahan sangat buruk. Hal tersebut dikarenakan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, karena banyak yang tersumbat, ditutup, atau menjamurnya PKL di lingkungan Kelurahan Sekeloa, sehingga aliran air menjadi tersumbat atau tidak lancar.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung seperti yang telah dipaparkan di atas, partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program REhabilitasi drainase, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Namun, berdasakan hasil observasi awal peneliti di lapangan, memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi

drainase masih rendah. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada tabel 1.1

dibawah ini :

Tabel 1.1
Program Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Sekeloa
Kecamatan Coblong Kota Bandung
Pada Tahun 2015

TAHUN	JENIS KEGIATAN	PANJANG SALURAN	PARTISIPASI MASYARAKAT	JUMLAH KK	PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM PEMB. INFRASTRUKTUR
2015	PEMBANGUNAN SALURAN AIR KOTOR PIPA DI RW 04	121x0.3x0.5m	- TENAGA - UANG - PERALATAN - MAKANAN	586	- 75 orang - 170 orang - tidak ada - Ibu-ibu turut terlibat menyumbangkan makanan dan minuman
	PEMBANGUNAN SALURAN AIR KOTOR BUIS DI RW 06	50x0.7x0.6m	- TENAGA - UANG - PERALATAN - MAKANAN	328	- 50 orang - 100 orang - sebagian membawa dari rumah - Ibu-ibu memberi sumbangan makanan dan minuman
	PEMBANGUNAN SALURAN AIR KOTOR PIPA DI RW 07	40x0.5x0.4m	- TENAGA - UANG - PERALATAN	585	- 80 orang - 180 orang - membawa dari rumah masing -masing
	PEMBANGUNAN PLAT DECKER DI RW 07	17x1x0.1m	- MAKANAN		- disiapkan oleh RW
	PEMBANGUNAN SALURAN AIR KOTOR GREVEL DI RW 09	160x0.5x0.4m	- TENAGA - UANG - PERALATAN - MAKANAN	495	- sebagian tenaga diambil dari luar masyarakat sekitar 60 orang - 120 orang - membawa dari rumah masing -masing - disiapkan oleh RW
	PEMBANGUNAN SALURAN AIR KOTOR GREVEL DI RW 13	58x0.5x0.4m	- TENAGA - UANG - PERALATAN - MAKANAN	511	- 80 orang - 150 orang - membawa dari rumah - sebagian ibu – ibu membawa makanan dari rumah

Sumber : Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sekeloa, 2015

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di masing masing RW 03, RW 04, RW 07, RW, 09 dan RW 13 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.. Hanya sebagian masyarakat yang mau yang menyumbangkan tenaga, uang dan makanan. Hal tersebut membuktikan bahwa belum semua warga masyarakat yang mau turut peduli dalam Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Indikasi-indikasi lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di masing masing RW 03, RW 04, RW 07, RW, 09 dan RW 13 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung antara lain :

1. Masih rendahnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah tentang rencana-rencana pembangunan di Program Rehabilitasi Drainase di masing masing RW 03, RW 04, RW 07, RW, 09 dan RW 13 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Sekeloa dalam bentuk tenaga.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk peralatan
5. Kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk turut melaksanakan Program Rehabilitasi Drainase Kelurahan Sekeloa

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti menduga permasalahan tersebut, dipengaruhi oleh beberapa factor namun dalam hal ini peneliti mencoba menghubungkannya dengan salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu pemotivasian. .Karena secara teoritis bahwa motivasi adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain seperti dipersepsikan orang-orang itu.

Sebagai salah satu konsep dalam pemecahan masalah yang diteliti, peneliti mencoba untuk menganalisis secara empirik dengan mengaplikasikan ‘asas-asas pemotivasian” Hasibuan, (2007:221) yaitu Asas Mengikutsertakan, Asas komunikasi, Asas pengakuan, Asas wewenang yang didelegasikan, Asas adil dan layak Asas perhatian timbal balik ke dalam operasionalisasi penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan kajian yang mendalam tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan adanya motivasi lurah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung melalui dimensi partisipasi dalam merencanakan dan memutuskan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam memanfaatkan hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pemotivasian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Seberapa Besar Pengaruh Pemotivasian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengaruh Pemotivasian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengaruh Pemotivasian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, sebagai upaya dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung untuk lebih memotivasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Drainase.